

## **IMPLEMENTASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**

*Fike M. Maliatja<sup>1</sup>*  
*Sarah Sambiran<sup>2</sup>*  
*Michael M.S. Mantiri<sup>3</sup>*

### **Abstrak**

Pembangunan yang terpusat hanya di kota menyebabkan wilayah perbatasan makin tertinggal. Masalah utamanya terletak pada kondisi infrastrukturnya yang memprihatinkan. Oleh sebab itu Masyarakat di daerah perbatasan masih membutuhkan bantuan dari negara tetangga. Dan juga peran pemerintah sangat di butuhkan di wilayah perbatasan. Sebagai negara yang merentang luas dan berbatasan dengan negara lain, Indonesia tidak terhindarkan dari masalah-masalah di perbatasan. Mulai dari pergeseran patok, terorisme, sampai kejahatan transnasional berupa penyelundupan atau imigran ilegal. Kawasan perbatasan memiliki peran sentral dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa. Dengan jumlah kawasan perbatasan yang besar, Indonesia berkepentingan untuk menjaga kedaulatan dari ancaman negara lain dan mensejahterakan kehidupan masyarakatnya di perbatasan. Sebagai beranda depan, wajah perbatasan Indonesia seharusnya mencerminkan kondisi yang aman dan sejahtera. Namun cara pandang masa lalu yang memandang kawasan perbatasan sebagai halaman belakang dan daerah terluar membuat pembangunannya kurang di perhatikan oleh pemerintah dan masyarakat. Indonesia yang sentralistik saat itu lebih mementingkan pembangunan kawasan pusat. Akibatnya, pembangunan kawasan perbatasan secara umum tertinggal dari daerah Indonesia lainnya. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

**Kata Kunci : Implementasi, Program, Pembangunan Infrastruktur.**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

<sup>2</sup>Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

<sup>3</sup>Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

## **Pendahuluan**

Permasalahan mendasar pembangunan di wilayah perbatasan adalah isolasi wilayah. Kebanyakan daerah perbatasan yang terisolasi tidak dapat mengakses berbagai aspek yang tersedia seperti di daerah perkotaan. Permasalahan yang tidak pernah tertangani ini kemudian berdampak terhadap kegiatan pengembangan kawasan pada seluruh bidang pembangunan, termasuk kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertanian dalam arti luas.

Program di wilayah perbatasan Indonesia tersebut di antaranya yakni pembangunan infrastruktur yaitu lebih difokuskan pada penyediaan akses infrastruktur jalan, pembangunan kantor desa, pengembangan sarana dan prasarana produk unggulan daerah perbatasan, serta kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Juga bagaimana memperbaiki kualitas infrastruktur dasar, serta fokus pada ketersediaan barang dan jasa di daerah perbatasan, penyediaan sistem jaringan pengawasan komunikasi perbatasan. Karena salah satu tujuan dari program pemerintah yaitu mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingatkan gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energy. Oleh karena itu pembangunan sektor ini menjadi

fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya.

Pembangunan yang terpusat hanya di kota menyebabkan wilayah perbatasan makin tertinggal. Masalah utamanya terletak pada kondisi infrastrukturnya yang memprihatinkan. Oleh sebab itu Masyarakat di daerah perbatasan masih membutuhkan bantuan dari negara tetangga. Dan juga peran pemerintah sangat di butuhkan di wilayah perbatasan. Sebagai negara yang merentang luas dan berbatasan dengan negara lain, Indonesia tidak terhindarkan dari masalah-masalah di perbatasan. Mulai dari pergeseran patok, terorisme, sampai kejahatan transnasional berupa penyelundupan atau imigran ilegal. Kawasan perbatasan memiliki peran sentral dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa.

Kurangnya kepedulian pemerintah terhadap kawasan perbatasan dapat diidentifikasi dari terbatasnya dana yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut. Hal ini menyebabkan kondisi masyarakat di kawasan tertinggal jauh dibandingkan dengan daerah lainnya. Padahal dalam konteks pembangunan nasional, semua daerah seharusnya tersentuh pembangunan secara merata, berkesinambungan dan lebih berorientasi pada kesejahteraan ketimbang aspek keamanan semata.

Maka arah Kebijakan pemerintah dalam pembangunan daerah dapat kita lihat pada salah satu poin arah kebijakan adalah menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi wilayah secara optimal dan mendorong usaha-usaha untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada sumber

daya alam yang dapat diperbaharui menuju masyarakat yang berkualitas, maju, mandiri dalam keanekaragaman penduduk dan kegiatannya.

Dengan jumlah kawasan perbatasan yang besar, Indonesia berkepentingan untuk menjaga kedaulatan dari ancaman negara lain dan mensejahterakan kehidupan masyarakatnya di perbatasan. Sebagai beranda depan, wajah perbatasan Indonesia seharusnya mencerminkan kondisi yang aman dan sejahtera. Namun cara pandang masa lalu yang memandang kawasan perbatasan sebagai halaman belakang dan daerah terluar membuat pembangunannya kurang di perhatikan oleh pemerintah dan masyarakat. Indonesia yang sentralistik saat itu lebih mementingkan pembangunan kawasan pusat. Akibatnya, pembangunan kawasan perbatasan secara umum tertinggal dari daerah Indonesia lainnya.

Peran pemerintah sangat di butuhkan di wilayah perbatasan. Sebagai negara yang merentang luas dan berbatasan dengan negara lain, Indonesia tidak terhindarkan dari masalah-masalah di perbatasan. Kawasan perbatasan memiliki peran sentral dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa, yang di maksud peran sentral yaitu daerah perbatasan adalah sebagai pusat atau tolak ukur bagaimana wilayah tersebut bisa aman dan terkendali.

Permasalahan mendasar pembangunan di wilayah perbatasan adalah isolasi wilayah. Kebanyakan daerah perbatasan yang terisolasi tidak dapat mengakses berbagai aspek yang tersedia seperti di daerah perkotaan. Permasalahan yang tidak pernah tertangani ini kemudian berdampak terhadap kegiatan pengembangan

kawasan pada seluruh bidang pembangunan, termasuk kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertanian dalam arti luas.

Program di wilayah perbatasan Indonesia tersebut di antaranya yakni pembangunan infrastruktur yaitu lebih difokuskan pada penyediaan akses infrastruktur jalan, pembangunan kantor desa, pengembangan sarana dan prasarana produk unggulan daerah perbatasan, serta kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Juga bagaimana memperbaiki kualitas infrastruktur dasar, serta fokus pada ketersediaan barang dan jasa di daerah perbatasan, penyediaan system jaringan pengawasan komunikasi perbatasan. Karena salah satu tujuan dari program pemerintah yaitu mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Pemerintah sesungguhnya telah menunjukkan perhatian yang lebih besar terhadap (pembangunan) wilayah perbatasan negara. Ini terbukti dari banyaknya stakeholder yang terlibat dalam upaya-upaya pembangunan wilayah ini dari berbagai aspek. Namun, fakta menunjukkan bahwa koordinasi atau perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga tidak simpang siur antar semua pihak tersebut cenderung masih terbatas dan juga masing terdapat kewenangan-kewenangan yang saling tumpang tindih.

Dalam pembangunan di kawasan perbatasan, pemerintah lebih cenderung mengedepankan pendekatan keamanan, karena kawasan tersebut dianggap rawan. Semestinya harus juga diimbangi dengan pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan dan lingkungan sehingga masyarakat di

kawasan tersebut terhindar dari kesenjangan yang berkelanjutan. Patut disadari bahwa kondisi geografis yang terisolir menjadi salah satu penyebab kawasan tersebut menjadi tersisihkan dalam pembangunan, kondisi yang demikian menyebabkan rentang pembangunan dan pengawasan administrasi pemerintahan menjadi sulit untuk dioptimalkan. Namun demikian pada sisi yang lain pemerintah juga kurang memberikan perhatian yang serius terhadap kawasan perbatasan.

Pernyataan dari ibu Z. A Landang selaku Kepala Bagian Pemerintahan dan pengelolaan perbatasan Negara yaitu: “Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Unsur yang kedua yang harus dipenuhi dalam proses implementasi program yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program, sehingga masyarakat dilibatkan dan membawa hasil dan merasakan hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Karena tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka dikatakan program tersebut telah gagal dilaksanakan. Berhasil atau tidaknya suatu program di implementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya(eksekutif). Sedangkan unsur pelaksanaan ini merupakan unsur ketiga, pelaksanaan penting artinya karena pelaksanaan baik itu organisasi maupun perorangan bertanggungjawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi program. Dapat disimpulkan bahwa implementasi program adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap suatu objek atau sasaran yang diarahkan

untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui adanya organisasi, interpretasi dan penerapan”.

Dalam aspek perlengkapan dan sarana penunjang aktivitas kantor untuk kegiatan memajukan kesejahteraan umum, maka upaya apa saja yang telah dilakukan demi kelancaran implementasi program dari pemerintah sendiri. Menurut Ibu Z. A. Landang yaitu: “Sebelum kita mengetahui berbagai kegiatan yang tergolong dalam jenis memajukan kesejahteraan masyarakat umum, alangkah baiknya kita mengetahui makna sebenarnya dari kesejahteraan umum terlebih dulu, maka dari itu setelah mengetahui makna kesejahteraan umum kita bisa menyebutkan contoh penyelenggaraan kesejahteraan umum. Berikut ini langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan umum warga Negara, adapun diantaranya adalah:

1. Optimalisasi lalu lintas dan angkutan jalan.  
Keberadaan lalu lintas dan angkutan jalan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat umum. Seorang pemerintah atau instansi harus memperhatikan system transportasi di daerahnya sehingga terwujud keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas.
2. APBN dan APBD pro rakyat setiap tahunnya pemerintah pusat membuat APBN sedangkan pemerintah daerah membuat APBD yang mana fungsinya mencapai tujuan nasional bangsa salah satunya. Dan juga pemerintah perlu mengadakan pengawasan secara ketat agar dana APBN dan APBD digunakan dengan semestinya.

3. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hak warga Negara hak warga Negara Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah hendaknya menghormati hak-hak tersebut sehingga rakyat merasa nyaman untuk tinggal, menetap bahkan bangga menjadi warga Negara Indonesia.
4. Pemberian jaminan kesejahteraan sosial untuk rakyat. Pemerintah bertanggung jawab terhadap warga negaranya tanpa membedakan kedudukan, kekayaan, ras maupun kebudayaan. Oleh karena itu penyelenggaraan kegiatan memajukan kesejahteraan umum harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk rakyat miskin.

## **Tinjauan Pustaka**

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Meter dan Horn dalam Wahab (2008:65) implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Artinya implementasi menurut KBBI yaitu pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan dalam pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan. Dalam kalimat ini implementasi itu sebagai penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menyebabkan dampak terhadap sesuatu.

Implementasi merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahannya yang sah dari suatu program yang meliputi upaya mengelola input. Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino 2006:124) mendefinisikan "Implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan". Tindakan-tindakan yang dimaksud mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh program.

Dalam konsep implementasi dapat disebut sebagai suatu proses pengumpulan sumber daya dan juga disertai dengan menentukan perbuatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pada dasarnya implementasi adalah suatu pemahaman terhadap apa yang harus dijalankan sesudah diputuskannya suatu kebijakan. Pada tahapan ini akan menghubungkan semua stake holder yang ada.

Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana, dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan dan sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari suatu kegiatan Westra(1989:236) mengatakan bahwa “program adalah rumusan yang memuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara – cara pelaksanaannya”. Siagian (dalam Westra 1989:124) mengatakan bahwa “penyusunan program adalah penjabaran suatu rencana yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga program kerja itu memiliki ciri-ciri operasional tertentu”. Lebih Lanjut di jelaskan jika suatu program yang baik harus memiliki ciri –ciri sebagai berikut:

1. Tujuan yang dirumuskan harus jelas
2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin.
4. Hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha pembangunan program pembangunan lainnya, karena suatu program tidak dapat berdiri sendiri.
5. Berbagai upaya dibidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan, dal lain-lain untuk melaksanakan program tersebut.

Implementasi merupakan suatu proses yang sangat penting ketika berbicara penberapan program baik itu yang bersifat sosial atau dalam dunia pendidikan. Implementasi program merupakan langkah-langkah

pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari program ini sendiri, Jones (dalam Arif Rohman 2009: 101-102) menyebutkan implementasi program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Implementasi program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Menurut Charles O. Jones ada tiga pilar aktivitas dalam mengopersikan program yaitu :

1. Pengorganisasian  
Struktur organisasi yang jelas di perlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.
2. Interpretasi  
Para pelaksana harus menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk peaksanaan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Dalam hal ini program harus memiliki petunjuk teknis yang dapat dijadikan pedoman oleh para pelaksana program.
3. Penerapan atau Aplikasi  
Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya. Hal ini sangat dibutuhkan dalam perjalanan program, prosedur kerja yang jelas dapat membantu pelaksanaan program menjalankan tugasnya mengelola sebuah pekerjaan yang mengandung pengertian tentang apa, dan bagaimana pekerjaan yang harus diselesaikan.

Kesimpulannya program merupakan interpretasi dari sebuah

kebijakan pemerintah yang berisi kumpulan instruksi, yang dibuat untuk memperbaiki permasalahan yang sedang berkembang. Program harus ada dalam mengimplementasikan suatu kebijakan agar hal tersebut dapat berjalan dengan teristematik dan sesuai dengan tujuan awal dari program tersebut.

Infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh publik atau masyarakat untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan ekonomi dan sosial.

Sistem Infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem social dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya siste social dan sistem ekonomi masyarakat. The world bank membagi infrastruktur menjadi tiga, yaitu:

1. Infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivivtas ekonomi, meliputi publik utilities(tenaga, telekomunikasi, air, sanitasi, gas), publick work(jalan, bendungan, irigasi, dan drainase), dan sector transportasi (jalan, rel,pelabuhan, lapangan terbang, dan sebagainya)
2. Infrastruktur social, meliputi,pendidikan, kesehatan, perumahan, dan rekreasi.
3. Infrastruktur administrasi, meliputi penegakan hokum, control administrasi, dan

koordinasi. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur, menjelaskan beberapa jenis infrastruktur yang penyediannya diatur pemerintah, yaitu: infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur pengairan dan infrastruktur pengangkutan minyak dan gas bumi.

Penggolongan infrastruktur tersebut dapat dikategorikan sebagai infrastruktur dasar, karena sifatnya dibutuhkan oleh masyarakat luas sehingga perlu diatur oleh pemerintah.

Pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan daerah diharapkan mampu meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. Pembangunan infrastruktur harus memperhatikan aspek keberlanjutan sehingga dalam jangka panjang keberadaan infrastruktur harus berdasarkan pda prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi serta memperhatikan aspek efesiensi dan keadilan.

Jadi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaud yang akan dibahas adalah pembangunan infrastruktur jalan dan Pembangunan kantor desa, hal ini disebabkan banyaknya jalan jalan yang tidak layak menjadi fasilitas umum karena kebanyakan jalan yang sudah rusak, dan juga Kantor desa yang hanya menggunakan rumah warga.

## Metode Penelitian

*Sekretariat:*

*Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.*

*Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. menurut sugiyono dalam bukunya metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d (2017:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian ini dilakukan di kantor Sekretariat Daerah tepatnya di jalan Bui Batu Melonguane, Kompleks Perkantoran Pemda bagian Pemerintahan, yang merupakan bagian pembangunan infrastruktur dan pengelolaan perbatasan negara.

Hal ini dilandasi oleh keinginan peneliti untuk mengetahui bagaimana implementasi program pemerintah Kabupaten Kepulauan Talud Untuk pembangunan infrastruktur.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan cara:

- (1) reduksi data atau penyederhanaan (data reduction),
- (2) penyajian data (data display), dan
- (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing).

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengobservasian, dan transformasi data mentah/data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat dipahami maknanya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (Sugiyono 2017:252) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (dapat dipercaya).

### **Hasil Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian ini yaitu “Implementasi Program Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talud Dalam Pembangunan Infrastruktur” maka peneliti ingin melihat bahwa apakah program pemerintah daerah ini benar-benar terealisasikan dan sasaran adalah kuatnya kesadaran dari masyarakat akan rasa kebangsaan dan pentingnya partisipasi dalam menjaga wilayah perbatasan tujuan dari penerapan

program ini agar setiap warga menyadari dan meningkatkan peran serta aktif masyarakat sebagai perwujudan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

Hampir semua kawasan perbatasan Indonesia adalah daerah tertinggal yang kondisinya sangat memprihatinkan sebagai wajah luar negara. Selama ini kawasan perbatasan dikelola dengan mengedepankan pendekatan keamanan sehingga pembangunan sosial ekonomi menjadi terabaikan. Mengingat pentingnya kawasan perbatasan bagi keutuhan NKRI. Persoalan kawasan perbatasan secara lebih rinci dalam mengajukan beberapa butir rekomendasi kebijakan. Selain mengingat perlunya perhatian dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud perlu juga kebijakan dari Pemerintah maupun dari pihak-pihak lain.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan di Sekretariat Daerah bagian Pemerintahan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

a. Bagaimana mengaktifkan pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia

Program pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam menjaga keutuhan wilayah perbatasan adalah dengan bekerja sama dengan setiap instansi maupun masyarakat setempat. Perbatasan Indonesia hingga saat ini masih memprihatinkan dari berbagai segi daerah-daerah perbatasan banyak mengalami keterbelakangan ekonomi karena tiadanya program dan proyek pemerintah maupun swasta. Jika kawasan perbatasan tidak segera dikelola dengan baik dan efektif, tentu kedaulatan negara akan segera menjadi pertaruhannya. Selama ini pemerintah dan masyarakat luas baru tersentak oleh seriusnya masalah perbatasan ketika ada

ramai ramai tentang hilangnya beberapa wilayah Indonesia.

b. Dinamika permasalahan kawasan perbatasan

Masalah perbatasan memiliki dimensi yang kompleks, terdapat sejumlah faktor krusial yang terkait di dalamnya, seperti kedaulatan Negara, politik, sosial, dan pertahanan keamanan. Secara garis besar terdapat tiga isu utama dalam pengelolaan kawasan perbatasan yaitu:

1) Penetapan garis batas baik di darat maupun di laut

2) Pengamanan kawasan perbatasan

3) Pengembangan kawasan perbatasan

Penanganan berbagai permasalahan pada tiga itu utama tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama yang berkaitan dengan aspek kelembagaan.

c. Pembahasan Observasi

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan antara Bagaimana pemerintah mengaktifkan pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia dan dinamika permasalahan di kawasan perbatasan. Program pemerintah ini adalah strategi pemerintah untuk menjaga wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai wilayah yang berada di perbatasan. Untuk mendukung program dari pemerintah ini.

Jadi dari program dan kegiatan pengelolaan kawasan perbatasan Kabupaten Kepulauan Talaud peneliti memperoleh hasil penelitian tentang strategi dari Pemerintah Daerah adalah strategi komunikasi, dalam upaya menemukan atau menelusuri substansi dari permasalahan yang terkait dengan implementasi program pemerintah.

## Kesimpulan

1. Implementasi program dari Pemerintah Kabupaten

*Sekretariat:*

*Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.*

*Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*

- Kepulauan Talaud adalah Implementasi mengenai kebijakan, karena dalam hal penerapan Program Pemerintah Kabupaten Talaud mempunyai peran yang sangat penting dalam pengambilan sebuah keputusan. Karena apabila Pemerintah salah mengambil keputusan maka sia-sia semua program yang telah di rencanakan dan diputuskan bersama.
2. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam hal ini Kepala bagian perencanaan dan pengawasan wilayah perbatasan menjelaskan ada tiga aspek perlengkapan dan sarana penunjang aktivitas kantor untuk kegiatan memajukan kesejahteraan umum, maka upaya apa saja yang telah dilakukan demi kelancaran implementasi program dari pemerintah sendiri yaitu:
    - a. Optimalisasi lalu lintas dan angkutan jalan
    - b. APBN dan APBD yang pro rakyat
    - c. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hak warga negara
  3. Dapat disimpulkan bahwa implementasi program adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap suatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui adanya organisasi, interpretasi dan penerapan atau antara lain instansi-instansi yang terkait.
  4. Bagaimana pemerintah Kabupaten Kepulauan Talud mengaktifkan pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia dan dinamika permasalahan di kawasan perbatasan. Program pemerintah ini adalah strategi pemerintah untuk menjaga wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai wilayah yang berada di perbatasan, dan salah satu program pemerintah yaitu pembangunan jalan di setiap desa yang ada di wilayah perbatasan.
  5. Persoalan pokok dalam hal ini berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah adalah karena dalam setiap pelaksanaan kebijakan membutuhkan suatu keahlian dan ketrampilan serta penguasaan terhadap berbagai persoalan yang hendak dikerjakan. Dalam kondisi yang demikian birokrasi juga mempunyai peran yang sangat menentukan. Karena birokrasi mempunyai kewenangan sebagai pelaksana kebijakan tersebut.

### **Saran**

1. Pemerintah Daerah hendaknya lebih mengupayakan peningkatan dan juga lebih berkontribusi melakukan pemerataan pembangunan khususnya infrastruktur jalan di daerah perbatasan. Dan juga berdasarkan program yang ditetapkan bagian pengawasan dan pengamanan wilayah perbatasan dalam penetapan program tersebut waktu yang diberikan harus sesuai dengan yang dijanjikan atau sesuai

- dengan apa yang telah disepakati bersama.
- Hendaknya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat, apa yang di perlukan masyarakat dan apa yang bisa membantu masyarakat untuk menunjang kebutuhan sehari-hari.
  - Pemerintah Desa seharusnya menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam program-program pemerintah karena peran masyarakat sangat penting dalam mendukung program-program pemerintah karena seperti yang diketahui saat ini implementasi pembangunan infrastruktur dalam bidang jalan dianggap tidak optimal sehingga menghambat kelancaran aktifitas masyarakat.
  - Keterlibatan instansi-instansi yang terkait juga sangat di butuhkan atau dengan kata lain sumber daya manusia masing-masing anggota satuan kerja dianjurkan supaya diberikan pelatihan secara intensif khususnya dalam hal menjaga wilayah perbatasan, sehingga dalam penyusunan program dan realisasi prigram dapat berjalan lebih efektif.
  - Kepala bagian perencanaan dan pengawasan wilayah perbatasan diharapkan mempunyai komitmen yang kuat dalam menciptakan kesamaan persepsi dikalangan satuan kerja perangkat kerja ,sehingga visi dan misi dari program

pemerintah dapat segera terwujud dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Artikel, *kebijakan infrastruktur, Kritis Pada Implementasi*, Oleh Didik J. Rachbini
- Brata,Roby Arya Brata,Membangun *integritas, Akuntabilitas dan evektivitas pemerintah*. Jakarta: Pustaka Kemang.
- Beratha, I.N. 2011. *Desa Masyarakat Desa, dan Pembangunan Desa*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- DR. H. Inu kencana syafiie, M.Si, 2017. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*.Bandung: refika ADITAMA.
- Edward, C. George., 2013., *Implementing Public Policy.*, Washington D.C, Congressional Quarterly Press.
- Evert Sandie Taasiringan, *Sejarah Kabupaten Kepulauan Talaud*, Tahun 2012
- Grindle, S, Merilee., 2010., *Politics and Policy Implementation.*, New Jersey, Princeton University Press
- Noveria Mita,Wuryandari Ganewati, Haba John, Noor Firman, Chitra Indah, Rucinawati, 2017. *Kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan: perspektif multidimensi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Priansa Donni juni, 2014. *Perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia*. Bandung: Alfabeta
- S, Nogi, Hessel, Tangklisan, *Implementasi Kebijakan Publik* . Jakarta :Lukman Offset, 2003

Sugiyono, 2017. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D.*

Bandung: Alfabeta

Saleh, Muhamad Hairul. *Dinamika Masyarakat Perbatasan*

Tachjan. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik.* Bandung: AIPI Bandung –Puslit KP2W Lemlit Unpad.

Tri Sulistyningtyas, Susanto, Dicky R. Munaf, 2015. *Sinergitas paradigma lintas sektor di bidang keamanan dan keselamatan laut.* Jakarta: Gramedia Digital

Zulmawan Wawan, 2017. *Panduan Praktis Kerjasama Aset Pemerintah, TNI & BUMN.* Jakarta: Jala Permata Aksara

## **Sumber-Sumber Lain**

BPS (Badan pusat statistik) Kab. Kepulauan Talaud dalam angka 2018

UU No. 26 Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang Nasional

Undang-undang nomor 8 tahun 2002 tentang pembentukan kabupaten Kepulauan Talaud

Undang-Undang No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur

Sekretariat Daerah tepatnya di jalan Bui Batu Melonguane, Kompleks Perkantoran Pemda.